

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat hambatan tarif dan non-tarif yang menghalangi perdagangan Indonesia dengan Madagaskar, terutama terhadap ekspor Indonesia ke Madagaskar. Produk impor dari Indonesia dikenakan tarif hingga 40 persen. Hal ini disebabkan oleh hambatan-hambatan politik, terutama dari pihak Madagaskar sehingga menghalangi ekspor Indonesia ke negara ini. Hingga saat ini belum ada kesepakatan perdagangan antara Indonesia dengan Madagaskar. Adapun produk-produk unggulan Indonesia di negara ini dikenakan pengamanan perdagangan (*safeguard*) oleh pihak Pemerintahnya karena potensi impor mereka diduga merugikan industri domestik yang memproduksi produk serupa. Pengenaan *safeguard* terhadap produk-produk Indonesia tersebut telah berdampak negatif pada neraca perdagangan kedua negara ini, terutama terhadap nilai ekspor Indonesia ke Madagaskar. Selain itu, pasar Madagaskar didominasi oleh pemasok-pemasok utamanya, dengan demikian Indonesia yang hanya menguasai sekitar 1 persen dari total impor Madagaskar harus berusaha keras sehingga dapat diminati oleh rakyat Madagaskar.
2. Tidak adanya stabilitas politik merupakan faktor utama membuat FDI tidak menarik di Madagaskar. Iklim berbisnis di Madagaskar sangat mengkhawatirkan

para investor asing, termasuk Indonesia, khususnya untuk keamanan investasi akibat tidak adanya stabilitas politik tersebut. Madagaskar juga mengalami masalah infrastruktur, di mana infrastruktur di negara ini tidak memadai, seperti kerusakan terutama jalan di lokasi-lokasi produksi ekonomi, jaringan kereta api yang kurang berkembang, transportasi jalur air yang terbatas, layanan udara tidak memadai untuk kebutuhan negara, dan harga listrik yang tinggi akibat kurangnya sumber energi. Selain itu, pajak juga merupakan hambatan Indonesia untuk berinvestasi ke Madagaskar. Untuk membuat bisnis di Madagaskar harus membayar banyak jenis pajak.

5.2 Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, adapun rekomendasi kebijakan untuk pemerintah Indonesia dan Madagaskar sehingga dapat meningkatkan hubungan bilateral di bidang ekonomi, khususnya perdagangan dan investasi sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan hubungan ekonomi, khususnya perdagangan, dan untuk menghilangkan segala hambatan perdagangan, Indonesia dan Madagaskar memerlukan kesepakatan perdagangan, seperti *Preferential Trade Agreement* (PTA)¹⁴⁸. Pembangunan industri strategis atau *packaging industry*¹⁴⁹ juga diperlukan untuk mengandalkan berbagai pajak tambahan.

¹⁴⁸ *Preferential Trade Agreement* (PTA) merupakan istilah yang digunakan dalam WTO untuk preferensi perdagangan, seperti tarif yang lebih rendah atau *zero tariffs* yang dapat ditawarkan oleh anggota kepada mitra dagang secara sepihak.

¹⁴⁹ *Packaging industry* mengadopsi solusi cerdas dan berkelanjutan untuk membuat kemasan produk lebih ramah konsumen, merek, dan lingkungan. *Packaging industry* memainkan peran penting untuk semua industri dan bisnis. *Packaging industry* juga menjadi salah satu faktor penentu daya saing produk industri nasional.

2. Bagi Pemerintah Indonesia, suatu pelajaran yang perlu dipertimbangkan jika ingin menanam modal investasi di Madagaskar adalah menggunakan *comtrade system integration*¹⁵⁰, tanpa mengutamakan *sovereign guarantees*¹⁵¹.
3. Bagi Pemerintah Madagaskar, pembentukan kantor perwakilan di Indonesia diperlukan sehingga memudahkan para pengusaha Malagasy untuk mendapatkan akses kepada pengusaha Indonesia baik untuk perdagangan maupun investasi, dan juga untuk meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia.



¹⁵⁰ *Comtrade system integration* adalah penyedia solusi perangkat lunak terdepan di pasar dan layanan transformasi digital. *Comtrade SI* menggunakan solusi terbaru, pengetahuan domain yang mendalam, dan kemitraan dengan vendor global untuk membantu mempercepat bisnis dan menyederhanakan penerapan teknologi baru.

¹⁵¹ *Sovereign guarantees* diberikan oleh pemerintah tuan rumah untuk meyakinkan pemberi pinjaman proyek yang berarti bahwa pemerintah akan mengambil tindakan tertentu atau menahan diri dari mengambil tindakan tertentu yang mempengaruhi proyek.